



Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Dikebut

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah memproses Peraturan Daerah (Perda) kelembagaan yang disesuaikan dengan Perda Keistimewaan DIY. Perda itu menjadi dasar perubahan nomenklatur beberapa kelembagaan seperti kecamatan menjadi kemandren yang diberlakukan mulai tahun 2020.

"Perda sedang kami bahas bersama Pansus Kelembagaan DPRD Kota Yogyakarta. Target Desember ini harus selesai dan disampaikan ke gubernur untuk evaluasi," kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Sarwanto, Selasa (3/12).

Dia menyampaikan, perda kelembagaan itu menjadi dasar perubahan beberapa lembaga di antaranya kecamatan menjadi kemandren, Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

"Perda kelembagaan hanya akan mengatur perubahan nomenklatur penyebutan kelembagaan agar sesuai dengan Perda Keistimewaan. Perubahannya bertahap tidak langsung," tambahnya.

Khusus untuk kemandren juga akan dilakukan perubahan dalam penyebutan jabatan camat dan jabatan di struktur organisasi kemandren. Dia mengatakan penyebutan camat akan menjadi mantri pamong praja, sekretaris kecamatan menjadi mantri anom, seksi pemerintahan menjadi jawatan praja, seksi ke-

tentruman menjadi jawatan keamanan, seksi perekonomian menjadi jawatan kemakmuran, seksi kesmas menjadi jawatan sosial, dan seksi pelayanan umum menjadi jawatan umum.

"Ketugasannya sudah diatur di perda DIY. Hampir sama tapi ada tambahan ketugasan seperti jawatan projo juga melakukan koordinasi pemantauan urusan keistimewaan di bidang tata ruang," jelas Sarwanto.

Meskipun ada perubahan nomenklatur penyebutan kelembagaan kecamatan, tapi tidak mempengaruhi jumlahnya. Tetap 14 kecamatan tapi disebut 14 kemandren. Termasuk nama-nama kemandren. Dicontohkan, Kecamatan Umbulharjo disebut Kemandren Umbulharjo.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Octo Nur Arafat menyatakan setelah perda kelembagaan ditetapkan, bagaiannya akan melakukan pengukuhan kemandren. Pihaknya berharap perubahan nomenklatur kelembagaan keistimewaan dapat ditindaklanjuti dengan pene gasan semangat keistimewaan di kemandren dalam kegiatan yang lebih detail, riil, tertata dan jelas dampaknya untuk masyarakat.

"Kewenangan kami hanya melakukan pengukuhan. Kami sudah diminta menyusun anggaran persiapan pengukuhan kemandren pada 2020. Termasuk kegiatan pendampingan," tandas Octo.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005